

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang)**

**Priscilia Grace Bay**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

e-mail: [priscilliabay@gmail.com](mailto:priscilliabay@gmail.com)

**Maria Elerina Douk Tunti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

e-mail: [maria.tunti@staf.undana.ac.id](mailto:maria.tunti@staf.undana.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah kasubag, kabid, kasubid, dan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 45 responden, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar. Analisisnya didasarkan pada jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan oleh peneliti. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 21. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.**

***ABSTRACT***

*This study aims to examine the effect of the government's internal control system on the effectiveness of regional financial management and the influence of human resources competencies on the effectiveness of regional financial management. This study uses a purposive sampling method. The sample in this study was the Head of Subdivision, District Head, Sub-Head of Subdivision, and Staff of the Regional Financial Institutions (ASN) of the Kupang Financial Region. The sample used in this study was 45 respondents, where data was collected through a distributed questionnaire. The analysis is based on respondents' answers obtained through questionnaires distributed by researchers. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS 21 program. The results of the study show that there is an influence between the Government's Internal Control System on the Effectiveness of Regional Financial Management and there is no influence of Competency Human Resources on the Effectiveness of Regional Financial Management.*

**Keywords : Government Internal Control System, Human Resource Competence, Regional Financial Management Effectiveness.**

## PENDAHULUAN

Pada perkembangan sistem pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang semakin pesat di Era Globalisasi saat ini sangat berpengaruh terhadap dunia pemerintah daerah, dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Pemberlakuan dari undang-undang ini mempertimbangkan bahwa efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan struktural dari fungsional pemerintah pusat bahkan daerah dan juga aspek potensi serta keanekaragaman daerah. Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada hakikatnya merupakan pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah tersebut, selain itu, pemberian otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya.

Orientasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan, baik dalam tahap penyusunan, penggunaan, maupun pertanggungjawaban dengan mendasarkan pada konsep (*value for money*) metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Dalam kaitannya dengan daerah, reformasi pengelolaan keuangan daerah sangat erat hubungannya dengan perubahan mekanisme dan instrumen pengelolaan keuangan daerah, serta perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, ini berarti, reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak saja fokus pada kreativitas daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga pembenahan instrumen (aturan main) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah anggaran daerah dan

pengelolaan keuangan daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan, yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi serta alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. (Mardiasmo, 2002).

Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah, dan tindak lanjut pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai, dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien (BPK RI, 2013) dalam Saleba (2014) SPI merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik. Setiap lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko yang ada. SPI mencari tindakan perbaikan apabila terjadi

hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan.

Selain SPIP, dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pula kompetensi sumber daya manusia (SDM). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno (2009:221) yaitu kompetensi dalam organisasi publik maupun privat sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, dimana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan dikarenakan pemerintah daerah masih belum melakukan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangannya dengan baik, maka dari itu diperlukan posisi pengelola keuangan yang berkompeten dibidang keuangan. Pemerintah merespon tuntutan kompetensi SDM tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Pasal 3, menyebutkan bahwa Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS), berupa pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pendidikan Akhir dan Jabatan**  
**di Badan Keuangan Daerah**  
**Kota Kupang.**

No	Pendidikan Akhir	Jabatan
1.	SE (Akuntansi). M.Si (S2)	Sekretaris
2.	S. Kom (S1)	Kasubang Perencanaan Dan Pelaporan
3.	SMA	Kasubag Umum dan

No	Pendidikan Akhir	Jabatan
		Kepegawaian
4.	SMA	Kasubang Keuangan dan Perlengkapan
5.	SE (Akuntansi). MM (S2)	Kabid Anggaran
6.	S.Sos (S1)	Kabid Perbendaharaan
7.	SE (Akuntansi) (S1)	Kabid Akuntansi dan Aset
8.	SP (Pertanian)(S1)	Kasubid Penyediaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
9.	SE (Akuntansi)(S1)	Kasubid Kas Umum
10.	SH (S1)	Kasubid Pelaporan Keuangan
11.	SP (Pertanian) (S1)	Kasubid Penyediaan Anggaran Belanja Langsung
12.	S.Sos (S1)	Kasubid Belanja Tidak Langsung
13.	SE (Akuntansi) (S1)	Kasubid Pencatatan Aset
14.	SE (Akuntansi) (S1)	Kasubid Hibah dan Bantuan
15.	SE (Akuntansi) (S1)	Kasubid Belanja Langsung
16.	SE (Akuntansi) (S1)	Kasubid Pemanfaatan Aset

*Sumber : data diolah peneliti, 2019*

**Tabel 1.2**  
**Daftar Jumlah Pendidikan Akhir di**  
**Badan Keuangan Daerah**  
**Kota Kupang.**

Pendidikan Akhir	Jumlah Orang
SMA	2
S1	12
S2	2
Jumlah	16

*Sumber : data diolah peneliti, 2019*

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dalam pengelolaan keuangan daerah, kompetensi SDM belum sepenuhnya memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintahan, dan keuangan daerah, maka kompetensi yang dimiliki oleh SDM organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan belum sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah kota Kupang belum sesuai karena SDM yang di tempatkan belum semua berkompeten dalam jabatan yang dimiliki, misalnya pada tabel 1.1 daftar pendidikan akhir dan jabatan yang dimiliki tidak sesuai dengan pendidikan akhir yaitu, Sarjana Pertanian (SP), jabatannya Kasubid Penyediaan Anggaran Belanja Langsung, maka tidak sesuai dengan profesi/bidang (Jabatan) dalam pendidikan akhir.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang”.

## KAJIAN TEORI

### **Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sistem pengendalian intern menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Komponen SPIP**

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, melalui peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian intern dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diadaptasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

### **Tujuan SPIP**

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang :

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara
2. Keandalan pelaporan keuangan

3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

### **Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Menurut Sutrisno (2009:221), mengatakan bahwa kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.

### **Komponen Pembentuk Kompetensi SDM**

Menurut Hutapea dan Thoha (2008) dalam Saleba (2014) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu :

1. Pengetahuan (*knowledge*), informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer.
2. Kemampuan (*skill*), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
3. Perilaku individu (*attitude*), perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.

### **Pengertian Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2002:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif”.

### **Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan pengertian keuangan daerah adalah sebagai berikut: keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Halim (2004:84), Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah ( PKD) dapat dilihat dari sebagai berikut :

1. Tanggungjawab (*accountability*), pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi ikatan keuangan.
3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan pada pengawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
4. Hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif, program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang singkat.
5. Pengendalian, aparat harus melakukan pengendalian agar tujuan dapat tercapai.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan atas dasar pemikiran adanya keinginan untuk mengelola keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien. PKD dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan tersebut

memuat berbagai kebijakan terkait dengan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Pada pemerintah kota kupang, peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yang tiap tahun diubah melalui Peraturan Walikota yaitu Peraturan Walikota Kupang Nomor 181 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Kupang. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Kupang tersebut meliputi :

1. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan realisasi dan perubahan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD.
2. Pengelolaan kekayaan dan kewajiban daerah, penata usahaan dan pertanggung jawaban.
3. Pengendalian intern, pengawasan dan pemeriksaan.
4. Penyelesaian kerugian daerah, tindak lanjut pengaturan pengelolaan keuangan daerah

Terkait dengan pengendalian intern, Walikota Kupang Nomor 181 Tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.
2. Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Pengendalian intern sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu terciptanya lingkungan pengendalian

yang sehat, terselenggaranya penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan kegiatan pemantauan pengendalian.

4. Penyelenggaraan pengendalian intern berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif yaitu informasi yang dinyatakan berupa satuan angka (numerik) ; bersifat diskrit/bulat/utuh atau kontinyu (pecahan/interval). Menurut Sugiyono (2018:14). Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positif, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden pada lokasi penelitian dan data sekunder dalam penelitian ini mengenai srstruktur organisasi, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari organisasi, dan peraturan daerah.

### Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap, maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner  
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Adapun isi kuesioner sebagai instrumen penelitian yang akan diberikan kepada responden terdiri atas:

- (1) Profil responden, meliputi nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja.
  - (2) Daftar pertanyaan kuesioner, meliputi pertanyaan mengenai variabel penelitian. Variabel menjadi sangat penting dalam penelitian, mengingat variabel merupakan alat dan sarana untuk melakukan pengukuran. Kuesioner yang saya gunakan merupakan kuesioner yang di adopsi dan dimodifikasi dari beberapa peneliti sebelumnya.
2. Dokumentasi
- Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen berbentuk tulis misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan sedangkan berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

#### **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2018:333) yang dimaksud teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik
  - (1) Uji normalitas
  - (2) Uji Multikolinearitas
  - (3) Uji Heteroskedastisitas
  - (4) Uji Autokorelasi
3. Analisis Regresi Linear Berganda
4. Uji Hipotesis
  - (1) Ujian Koefisien Regresi Parsial (Uji Statistik t)
  - (2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hipotesis 1 penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berarti apabila dilakukan peningkatan terhadap SPIP, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkat. Didukung dengan pengujian nilai regresi diketahui nilai  $t$  hitung  $2,913 > t$  tabel  $2,01808$  dan tingkat sig sebesar  $0,006 < 0,05$ , yang berarti SPIP berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga  $H_a$  dapat diterima adalah bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang diterapkan maka semakin terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif.

Koefisien regresi SPIP menunjukan hubungan positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai sebesar  $0,777$  atau sebesar  $77,7\%$ . Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel SPIP naik sebesar  $1\%$ , maka dependen yaitu efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan meningkat sebesar  $77,7\%$ .

Dalam hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa tidak terdapat kelemahan dalam SPIP, dikarenakan SPIP di BKD Kota Kupang sudah diterapkan dengan baik dan benar misalnya lingkungan pengendalian sudah memberikan kontribusi yang baik dalam menciptakan suasana kerja sehingga dapat mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kinerjanya, ASN sudah mampu meningkatkan kinerjanya dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, ASN sudah meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan (program) yang sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, ASN Badan Keuangan Daerah sudah memberikan dampak baik bagi peningkatan kinerja karena sudah memperoleh dan bertukar informasi yang diperlukan dalam melakukan aktivitas operasional instansi, dan pimpinan sudah melakukan pemeriksaan atau tindakan perbaikan terhadap pemantauan kinerja ASN,

sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Dimana sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner yang peneliti sebarkan kepada responden rata-rata Aparatur Sipil Negara (ASN) menilai bahwa sangat setuju terhadap pernyataan yang menggambarkan ke lima (5) indikator dalam variabel  $X_1$  SPIP.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis 2 Kompetensi (SDM) tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berarti apabila dilakukan peningkatan terhadap SPIP, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkat. Didukung dengan pengujian nilai regresi diketahui nilai  $t$  hitung  $1,713 < t$  tabel  $2,01808$  dan tingkat sig sebesar  $0,094 > 0,05$ , yang berarti kompetensi (SDM) tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga  $H_a$  ditolak berarti kompetensi SDM belum sepenuhnya memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintahan, dan keuangan daerah dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan belum sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah maka pengelolaan keuangan daerah belum efektif.

Koefisien regresi kompetensi SDM menunjukkan hubungan positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai sebesar  $0,427$  atau sebesar  $42,7\%$ . Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM naik sebesar  $1\%$ , maka dependen yaitu efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkat sebesar  $77,7\%$ .

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ada atau tidaknya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki ASN efektivitas

pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan dengan baik. Hal ini bisa saja disebabkan banyak faktor-faktor diluar kompetensi SDM yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah contohnya seperti pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Semakin lama bekerja dalam suatu bidang keuangan di organisasi pemerintahan maka semakin banyak pengalaman kerja dan semakin memahami apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan dan jika program pelatihan telah dilakukan secara terus-menerus maka dapat meningkatkan produktivitas kerja dan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja ASN.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hipotesis 3 penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil perhitungan dan analisis nilai  $F$  sebagaimana dari tabel ANOVA menunjukan Pengujian pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji  $F$ . Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai  $F$  hitung =  $88,650 > f$  tabel  $3,22$  dan tingkat sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan tabel output SPSS “Model Summary”, diketahui nilai koefisien determinasi atau  $R$  Square adalah sebesar  $0,808$ . Nilai  $R$  Square ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau “ $R$ ”, yaitu  $0,899 \times 0,899 = 0,808$ . Besarnya angka koefisien determinasi ( $R$  Square) adalah  $0,808$  atau sama dengan ( $=$ )  $80,8\%$ . Angka tersebut mengandung arti bahwa diberikan variabel SPIP ( $X_1$ ) dan variabel Kompetensi SDM ( $X_2$ ) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Efektivitas PKD ( $Y$ ) sebesar  $80,8\%$ . Sedangkan sisanya ( $100\% - 80,8\% = 19,2\%$  ( $0,192$ )) dipengaruhi oleh variabel lain

seperti teknologi informasi akuntansi, pengawasan fungsional, dan sistem akuntansi keuangan daerah atau disebut juga sebagai eror ( $e$ ) di luar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan yaitu :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( $Y$ ) pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diterapkan maka Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diterapkan maka Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan semakin buruk. Hal ini didukung oleh unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam pencapaian tujuan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( $Y$ ) pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ada atau tidaknya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki ASN efektivitas pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan dengan baik.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia semakin baik maka Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Daerah juga akan semakin baik begitu pula sebaliknya atau salah satu variabel semakin buruk maka akan mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Bagi Objek Penelitian  
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang untuk tetap meningkatkan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam kinerja, agar semakin baik dan berhasil menggapai tujuan yang layak dicapai dan perlu meningkatkan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam organisasi pemerintahan, ASN harus dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan mereka sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi pemerintahan, dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat terwujud Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dihasilkan efektif dan efisien.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - (1) Dapat dilakukan penambahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti teknologi informasi akuntansi, pengawasan fungsional, dan sistem akuntansi keuangan daerah
  - (2) Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti metode wawancara langsung, survei lapangan, observasi, dan lain-lain.
  - (3) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas daerah atau populasi penelitian dan memperbanyak jumlah responden atau sampel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggelina A.P Simanungkalit. (2013). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1-19.
- Dodik Slamet Pujiono, Hari Sukarno, dan Novi Puspitasari. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2016 , 1-14.
- Fandi Wijaya. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Penegndalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1-61.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21*. Semarang : Undip.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Joni Iskandar. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jom Efecon, Volume 2. Nomor 2, Tahun 2015, 1-15.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementrian Keuangan Tahun Anggaran 2012, (Online), (<http://www.kemenkeu.go.id/>).
- Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, (Online), (<http://repository.upi.edu/>, diakses 29 Januari 2014) Keuangan Semester 1 Tahun 2013, (Online), (<http://www.bpk.go.id/>).
- Lopita Turwirdani. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jom Efecon, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2015 , 1-15.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : C. V Andi Offset .
- Mei Sari Simatupang. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jom Fekon, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2017 , 1-15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Pedoman Publication Division
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Walikota Kupang.No. 181 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Daerah.
- Siti Nurjannah Saleba. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1-173.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang No.32. Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.